

Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman

Wahyu Yendra¹, Zikri Alhadi²

¹²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
e-mail: yendrawahyu2000@gmail.com

Abstrak

Studi ini ditujukan untuk menyadari efektivitas Aplikasi SIKAP untuk menaikkan kinerja aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Studi ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Studi ini memakai metode studi kualitatif deskriptif. Penghimpunan informasi dikerjakan melalui cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data studi berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menggunakan 5 indikator diantaranya, pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Kata kunci: *Efektivitas, Kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

Abstract

This study aims to assess the effectiveness of the SIKAP Application in improving the performance of apparatus at the Education and Culture Office. The study was conducted at the Education and Culture Office of Padang Pariaman Regency. This study employs a descriptive qualitative research method. Information gathering was carried out through interviews, observations, and documentation. The data sources for this study come from primary and secondary data. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The research results utilize 5 indicators, including program understanding, target accuracy, timeliness, achievement of objectives, and tangible changes.

Keywords: *Effectiveness, performance, Department of Education and Culture*

PENDAHULUAN

Bentuk nyata dari upaya pemerintah untuk menjadikan pemerintahan yang baik yaitu membuat system dalam membantu terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang mudah, terbuka, dan bertanggung jawab, juga menjaga hubungan yang baik di antara instansi pemerintahan. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dimana Instruksi Presiden ini menjadi awal dari intruksi untuk pengembangan sistem berbasis teknologi dalam manajemen kegiatan pemerintah dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Dalam Inpres diatas disebutkan pemakaian dan pengubahan untuk tata kelola di pemerintahan disebabkan oleh perkembangan zaman dan serta pada saat ini Indonesia sedang menjalani evolusi kehidupan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan secara dasar mengarah ke metode pemerintahan yang demokrasi terbuka serta menaruh kekuasaan hukum. Evolusi yang sedang dijalani itu memberikan ruang untuk penyusunan segala kehidupan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, dimana kepentingan rakyat bisa kembali diletakkan pada posisi utama. Evolusi itu meminta terjadinya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bisa jawaban untuk permintaan evolusi dengan mudah. Pemerintah perlu bisa melengkapi dua bentuk permintaan rakyat yang tidak sama tapi berhubungan kuat, yaitu rakyat yang meminta layanan publik yang melengkapi kebutuhan seluruh rakyat di sepenjuru wilayah, bisa diharapkan dan andal, serta gampang digapai dengan responsif, dan rakyat membutuhkan untuk suara mereka diperhatikan, dengan begitu pemerintah perlu memberikan sarana dan prasarana partisipasi, serta dialog public dalam pembuatan kebijakan negara.

Merespon rintangan itu, pemerintah perlu bisa membuat hal segar di organisasi, metode mengatur, dan prosedur tugasnya. Dengan begitu, pemerintah harus cepat melakukan proses evolusi ke arah e-government. Lewat proses evolusi itu, pemerintah bisa memaksimalkan penggunaan kemajuan teknologi informasi untuk menghapus pembatas-pembatas kelompok birokrasi, serta membuat hubungan metode mengatur dan prosedur tugas yang membolehkan Lembaga-lembaga pemerintah bertugas dengan teratur dalam memudahkan masuk di seluruh berita dan layanan rakyat yang perlu diadakan bagi pemerintah. Untuk menjawab Instruksi Presiden tersebut diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan ini merupakan peraturan lanjutan dalam pendukung aturan untuk perubahan atau peralihan dalam penggunaan e-government untuk diterapkan untuk pengelolaan dan pelayanan pemerintah. Di dalam peraturan ini dijelaskan aturan untuk penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu perjalanan pemerintahan yang memakai teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan servis ke pemakai SPBE. Bentuk dari penggunaan e-government di birokrasi bertujuan untuk menaikkan kualitas perubahan birokrasi, contoh penggunaan sistem Si-Kerja, e-Budgeting, e-KTP, e-SIAK, e-Kinerja dan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah diantara pemerintah daerah yang menciptakan inovasi dalam penggunaan metode pemerintahan berbasis teknologi. Diantara bentuk realisasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan pemerintahan adalah digunakannya aplikasi yang diberi nama dengan Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) di sekitar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) mulai diterapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman sejak 27 Desember 2022, aplikasi adalah

hasil dari Inovasi melalui kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penerapannya Sistem Kinerja Aparatur (SIKAP) dipakai oleh seluruh Dinas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, tidak terkecuali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

METODE

Jenis metode penelitian pada studi ini adalah kualitatif deskriptif. Pendapat Husaini (2020) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara menyeluruh terhadap suatu objek, seorang peneliti menjadi instrumen utama dalam suatu penelitian serta menggambarkan kejadian dan fakta dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan untuk teknik analisis data, teknik yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektivitas Aplikasi SIKAP untuk menaikkan kinerja aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, peneliti menggunakan teori efektivitas yang diusulkan oleh Sutrisno (2007) dan menganalisisnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan.

Pemahaman Program

Pemahaman program merujuk pada cara suatu program diimplementasikan agar dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Hal ini bertujuan agar saat kebijakan dilaksanakan, pelaksanaannya bisa berlangsung dengan gampang. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan program tersebut perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai program ini. Dalam perjalanan program dari aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP), aplikasi ini dibuat sederhana agar mudah dipahami dan dipelajari oleh seluruh pegawai yang terdapat pada sekitar Pemerintah Padang Pariaman. Tidak hanya itu, supaya aplikasi ini bisa dijalankan Pemerintah Padang Pariaman menyusun tata cara serta tutorial melalui BKPSDM lalu dikeluarkan bersama dengan Surat Edaran Bupati yaitu Surat Edaran yang bernomor 782/02/BKPSDM- PKP/III/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain dari Surat Edaran Bupati yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan Pelatihan untuk pegawai dalam pemakaian aplikasi tersebut.

Ketepatan Sasaran

Sasaran yang diulas pada pembahasan ini adalah aspek yang harus dinilai dengan langsung terkait kehadiran aplikasi. Hal ini penting untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai sasaran dengan ketentuan yang telah ditujukan. Sebuah kebijakan dapat dianggap efektif jika kebijakan tersebut tepat dengan tujuan yang telah ditujukan dari pertama. Keberadaan aplikasi SIKAP sendiri ada didasarkan kebijakan yang diterbitkan oleh Bupati yaitu Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang

Pariaman tahun 2022. Aplikasi Sikap dibuat untuk memenuhi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dimana untuk terpantaunya efektivitas kinerja aparatur di sekitar Pemerintah Padang Pariaman, jadi dibutuhkan suatu program informasi yang bisa menolong dalam pengawasan kehadiran dan kinerja pegawai. Dari hal itu maka dibuat Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP), selain itu aplikasi ini dibuat untuk menggantikan sistem lama yang terlalu banyak celah.

Tepat Waktu

Waktu adalah faktor yang sangat perlu dalam setiap prosedur kehidupan. Ketepatan waktu untuk konteks ini menunjukkan bahwa sebuah metode dapat dianggap mudah jika pelaksanaannya tepat dengan jadwal yang telah ditunjukkan. Semakin tepat waktu pelaksanaan metode, semakin bagus metode itu dapat direalisasikan. Dalam pengambilan absen aplikasi SIKAP harus dilakukan tepat waktu, dimana untuk pengambilan tersebut diatur untuk absen pagi pada jam 07:00 - 07:30 WIB dan jam pulang absen dapat dilakukan dari jam 16:00 WIB tetapi berbeda dengan guru yaitu pada jam 14:30 WIB. Absen dilakukan pada titik lokasi yang sudah ditentukan. Untuk jam pagi apabila pengambilan absen dilakukan melewati dari jam 07:30 WIB maka akan dihitung terlambat dan akan diberikan sanksi yaitu pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) sebesar 0,5% per setiap 30 menitnya. Apabila pegawai melakukan dinas luar pengambilan absen bisa dilakukan dengan memfoto SPT (Surat Perintah Tugas) dan melakukan selfi pada tempat dinas luar, lalu di kirim pada menu dinas luar yang ada pada fitur aplikasi.

Tercapainya Tujuan

Menilai tingkat keefektifan sebuah metode dilihat dengan cara menilai sampai mana target telah ditunjukkan sejak pertama dapat dipenuhi. Keberhasilan dalam mencapai tujuan program diukur berdasarkan sejauh mana beberapa sasaran yang telah ditentukan dapat direalisasikan. Tujuan dari aplikasi SIKAP adalah untuk pengawasan kehadiran dan pelaporan kinerja. Adanya aplikasi Sistem Informasi Sistem Kinerja Aparatur (SIKAP) membuat lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau guru, dan sistem ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan sistem sebelumnya yaitu Finger Print. Semenjak penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) membuat pegawai dan guru lebih disiplin dengan hadir pagi dan tetap disekolah walau sudah selesai mengajar dikelas. Sehingga hal ini jika diteruskan dilakukan akan mencapai tujuan yaitu dari adanya aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).

Perubahan Nyata

Indikator yang menunjukkan sejauh mana suatu program dapat memberikan dampak atau efek yang dirasakan secara langsung oleh sasaran program. Hal ini mencakup perubahan yang signifikan dalam kondisi atau situasi yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang terlibat. Dari penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) dilihat adanya dampak positif perubahan nyata, yaitu perubahan nyata terhadap kinerja pegawai dimana tingkat produktifitas pegawai

mencapai 80% dan kehadiran pegawai 100% dengan adanya aplikasi sikap. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) juga mempermudah pekerjaan yang awalnya lebih ekstra dan memakan waktu jadi lebih mudah dan cepat. Adanya aplikasi SIKAP membuat pegawai lebih disiplin dan teratur, tidak hanya pegawai guru juga dimana sebelumnya guru yang mata pelajaran cuma di sekolah di jam kelasnya saja menjadi selalu hadir di sekolah. Dengan itu dapat dilihat bahwasanya adanya perubahan nyata yang terjadi dengan digunakannya aplikasi SIKAP.

SIMPULAN

Efektivitas Aplikasi SIKAP dalam menaikkan kerja aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya efektif melalui tingkat produktifitas yang meningkat sekitar 80% dan dengan kehadiran yang 100% sebagaimana yang disebutkan oleh Buk Mardiaty, S.Sos Admin dari Aplikasi SIKAP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. Tidak hanya itu aplikasi juga semakin efektif dengan mudahnya penggunaan aplikasi serta adanya panduan penggunaan aplikasi serta adanya pelatihan yang diberikan kepada pegawai. Akan tetapi, tetap saja ada kendala yang menjadi penggunaan aplikasi kadang terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutrisno. (2007). Manajemen Keuangan teori, konsep, dan aplikasi. In Ekonisia. Ekonisia.
- Husaini, F. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Quadrant.
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Rama Wahyudi, Sri Umiyati, Husni Tamrin. "Efektivitas Aplikasi E-Personal Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai ". Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan | Volume 8, Nomor 4, Januari-Maret 2023.
- Eliya Putri Utami, Aldri Frinaldi. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sicantik Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Vol. 3, No. 1.
- Diah Budi Astuti. 2018. Pelaksanaan Aplikasi E-Kinerja Di Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2021 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022.
- Surat Edaran Bupati Padang Pariaman Nomor: 782/02/BKPSDM PKP/III/2023 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.